

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama Orde Baru, pemerintah Indonesia menggunakan sistem sentralisasi di seluruh negeri. Pemerintahan berada di pusat dan oleh pemerintah pusat dikendalikan. Sejak awal, pemerintah pusat tidak fleksibel karena ketergantungannya pada para pemimpin sistem politik. Mereka dipaksa untuk memilih dan mempertimbangkan isu-isu yang hanya menguntungkan posisi dan kekuasaan mereka sebagai akibat dari sistem tersebut. Namun, persoalan masyarakat Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan politik justru diabaikan. Sebagai pejabat publik, pemerintah kurang memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini kemudian mengakibatkan pemerintah pusat tidak mampu memajukan kesejahteraan sosial rakyat. Selain itu juga, pemerintah tidak diberi akses dan kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi di daerahnya sendiri serta mengembangkan kearifan lokal. Tanpa ini, pelayanan publik tidak akan tertata dengan rapi, yang berimbas kepada kehidupan masyarakat yang jauh dari kata sejahtera dan perkembangan tingkat pencapaian masyarakat tidak meningkat. Imbasnya kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan pemerintah turun hingga kemudian muncul gerakan reformasi yang didukung oleh kelompok-kelompok pemuda dengan politik demokrasi yang terpelajar, yang masa terbesar pada tahun 1998.

Semua aspek kehidupan berkembang dari waktu ke waktu termasuk ekonomi budaya, social, teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Industri teknologi informasi mengalami perkembangan tercepat saat ini. Wikipedia menyatakan bahwa teknologi informasi terdiri dari dua komponen, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Istilah "teknologi informasi" mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan proses, instrumen, manipulasi dan pengelolaan data, sedangkan "teknologi komunikasi" mengacu pada penggunaan perangkat untuk memproses dan mentransfer data antar perangkat. Oleh karena itu, istilah "teknologi informasi" dan "teknologi komunikasi" tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, TIK mengacu pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, modifikasi, pengelolaan, dan pengiriman data antar media. Pada saat ini,

perkembangan TIK dari anak kecil hingga orang dewasa tidak dapat dihindarkan. Sampai semua orang mengetahui teknologi TIK dan menggunakannya dalam kehidupan mereka. Teknologi membuat pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari jauh lebih mudah, sekaligus memberikan hiburan serbaguna bagi mereka yang menginginkannya.

Perkembangan TIK kini juga telah merambah sektor pemerintahan Indonesia. Mulai dari pendataan hingga pengabdian masyarakat. Kepala daerah hingga kepala desa dituntut harus membuat perubahan dalam pengelolaan pemerintahan dengan mengikuti perkembangan teknologi hingga saat ini. Karena penggunaan TIK dapat pengelolaan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. TIK bermanfaat untuk pengelolaan administrasi, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik. Sebelumnya, pelayanan publik membutuhkan waktu tunggu berjam-jam bahkan sehari-hari untuk perawatan, namun kini berkat penerapan TIK, pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Teknologi yang saat ini diadopsi oleh negara khususnya di wilayah pedesaan adalah Desa Digital. Digikylä ini membuat layanan komunitas desa menjadi lebih efisien dan fleksibel. Artinya, masyarakat yang mengurus dokumen catatan sipil, dengan adanya Desa Digital masyarakat tanpa harus datang ke kantor desa, cukup dengan satu handphone. Namun, saat ini masih ada masyarakat desa yang masih awam dengan adanya teknologi. Dan masyarakat juga belum paham cara kerja Desa Digital itu seperti apa. Apalagi anak-anak sekolah dasar yang memiliki karakter senang bermain.

Pemerintah dari yurisdiksi yang relevan, termasuk daerah, adalah pejabat pelayanan publik utama yang mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaannya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi seefektif mungkin sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sejalan dengan salah satu syarat untuk reformasi birokrasi publik, reformasi birokrasi pemerintahan. Birokrasi yang bebas dari korupsi, nepotisme, dan praktik buruk lainnya akan memberikan layanan publik yang tepat waktu, efisien, efektif, dan konsisten, hak asasi birokrasi yang tidak dapat diganggu gugat. Skenario idealnya adalah bahwa

efektivitas proses akan ditingkatkan dengan penggunaan birokrasi berbasis output untuk tujuan pemantauan produksi produk birokrasi tanpa campur tangan dari masyarakat untuk mendorong masyarakat membayar biaya yang berlaku, seperti suap, pungutan sukarela, dan pungutan lainnya dalam suatu proses pelayanan yang sedang berlangsung.

Desa bagian penting dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan di desa bertujuan mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota. Selisih dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam suatu pelayanan bagi masyarakat di desa, pemerintah desa harus pintar-pintar dalam melakukan pelayanan bagi warganya. Dikatakan desa mandiri, apabila desa tersebut dapat mengelola desanya sendiri dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan. Pelayanan yang dilakukan harus memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan mulai dari mengurus dokumen hingga mengurus yang berhubungan dengan pelayanan di desa. Inovasi pemerintah saat ini, mencanangkan yang namanya Desa Digital, dimana program tersebut menggandeng teknologi pada saat ini dalam melakukan pelayanan di desa, mulai dari pelayanan sistem informasi hingga pelayanan DUKCAPIL.

Pelayanan Publik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah ruang yang pada dasarnya dibutuhkan di setiap negara yang pernah ada. Istilah ini dapat merujuk pada seseorang yang meminta layanan, seseorang yang memberikan bantuan terhadap orang lain yang membutuhkan, atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi tertentu dan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Orang yang harus dianggap sebagai pemimpin adalah perdana menteri, yang pada saat itu tidak hanya bertugas memimpin dirinya sendiri, tetapi juga memimpin warga negara dengan memastikan bahwa setiap potensi keharmonisan sosial dapat diwujudkan di semua bidang kegiatan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang standar prosedur pelayanan publik menetapkan standar pelayanan publik yang tinggi. Untuk meningkatkan standar ini, kebijakan ini diperlukan. Namun, proses ini tidak akan berjalan secepat yang seharusnya jika mesin tidak bekerja seefisien mungkin untuk mengoptimalkannya. Proses ini harus dilakukan secara konsisten dengan mempertimbangkan apa yang saat ini

dibutuhkan oleh masyarakat umum dan membuat kehidupan sehari-hari mereka lebih mudah. Orang-orang di negara mana pun memiliki hak untuk mendapatkan layanan publik yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi.

Di Indonesia, berbagai instansi pemerintah pusat, daerah, dan bahkan desa menerapkan e-government. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua lembaga pemerintah sangat berhati-hati dalam membangun dan menerapkan e-government. Namun, kemajuan digital dalam pelayanan publik di Indonesia masih terbatas pada pembuatan situs web instansi pemerintah, yang masih pada tahap awal pengembangan. Setiap lembaga pemerintah tampak sangat tertarik untuk membuat situs web mereka sendiri. Meski begitu, tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, instansi pemerintah mulai mengembangkan berbagai aplikasi. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran model pengembangan yang semula berbasis web menjadi berbasis aplikasi. Namun sayangnya, dalam perkembangannya, instansi pemerintah terkesan kurang serius dalam mencapai perkembangan tersebut. Dimana hampir setiap instansi pemerintah mengembangkan berbagai inovasi digital hanya terlihat begitu bagus pada tahap persiapan. Artinya, setiap instansi pemerintah terlihat sangat antusias dengan proses produksi, namun tidak disertai dengan proses pemutakhiran atau pengelolaan informasi yang konstan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, masalah penelitian ini adalah bagaimana menerapkan kebijakan Program Desa Digital untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa sidomulyo mengenai pelayanan di desa yang menerapkan kebijakan desa digital yang berbasis sistem pelayanan menggunakan teknologi. Serta bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi peneliti di bidang penelitian.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini bisa digunakan untuk mengkaji teori-teori yang terkait dengan implementasi kebijakan, khususnya penelitian yang terkait dengan pelayanan berbasis digitalisasi masyarakat pedesaan. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan kontribusi, literasi, dan studi banding untuk peneliti selanjutnya.

